



**MINTA WAKTU:** Suasana kawasan Jalan Perwalian saat akhir pekan, Jogja, kemarin (13/11). Kelompok pedagang yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwalian (FKKP) meminta perpanjangan waktu pengosongan kawasan itu karena akan dibangun Jogja Planning Gallery (JPG) oleh Pemprov DI.

# Pedagang Klaim Tak Ada Penolakan Relokasi

**Dukung Program JPG, Minta Perpanjangan Waktu Pengosongan**

**JOGJA, Radar Jogja** - Belum pernah mendapat informasi relokasi, Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwalian (FKKP) mengkonfirmasi statement Wali Kota Jogja Sumardi. Mereka menyatakan tidak benar melokai pindah dari Jalan Perwalian ke Pasar Klinik.

Melibora nantinya akan dasar untuk dijadikan sebagai kawasan pedestrian. Area itu lintas akan diarahkan di strip-strip kawasan Melibora.

# Pedagang Klaim Tak Ada Penolakan Relokasi

Sambungan dari hal 1  
Ketua FKKP Adi Kusuma Putra Suryono mengatakan, sedana ini pedagang tidak pernah melidukan penolakan atas rencana pengosongan bangunan dan penidahan ke tempat baru untuk rencana program pemerintah. Namun, sejauh ini instra informasi relokasi belum tersampaikan ke mereka. Baru hanya sosialisasi, itu pun tidak pertama. Raha lada (R2010) di kawasan perumahan.

"Mengenai statement Bapak PJ Wali Kota media mengesklam bahwa waktu sosialisasi sudah lama dilakukan dan relokasi yang telah diumumkan pemkot, saya pastikan tidak benar," katanya kepada *Radar Jogja* kemarin (13/11).

Adi menjelaskan, dalam andean-an sosialisasi pertama diterima pada 24 Oktober 2022 dengan nomor surat 005/2511 oleh Dinas Perencanaan dan Tata Ruang (Disperatru) Kota Jogja. Sosialisasi diklaim baru pertama itu dilakukan, meski di undangan sosialisasi tertera perihal sosialisasi pengosongan kios dan relokasi. Tetapi saat forum berlangsung,

Dispetaru sama sekali tidak memicarakan soal masalah relokasi. "FKKP di 2024 sesuai informasi sebelumnya yang kami terima secara verbal. Itu itu terjadi, kami sudah sepakat siap pindah, tetapi ada kompromisi apa pun. Siap pindah di atas patil," jelasnya.

Namun jika tidak, mereka meminta sampai waktu menahang mencakup minimal 15 hari setelah Idul Fitri, Mei 2023. Dengan kompromisi relokasi sesednya di mana pun. Ini karena pandemi Covid-19 cukup mengganggu ekonomi mereka, sehingga banyak yang sudah terlanjur menangan modal ke beberapa tembagae leasuran dan kebanyakan sebulan tahun 2022. "Ya, secara tidak langsung ini dasar acuan kami, karena kami berusaha buhau waukud dan karena desakan pandemi Covid-19" terangnya.

Terhail hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kelatgan DPRD Kota Jogja dan provinsi awal Oktober lalu, untuk memluta merembatanti solusi terbah, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Demikian pada sudah memberi surat ke Keraton Jogja atas yang memberi danah

pengosongan itu untuk keperluan negosiasi, diskusi, dan audiensi. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan apa pun. "Kami takutnya ada diskomunikasi antara bawahan dan atasan, karena sampai kehar statement seperti itu. Kami tetap minta ada kebaik dari pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, PJ Wali Kota Jogja Sumardi mengatakan, perlok adalah menyempatkan relokasi pedagang Jalan Perwalian sejak lama yakni sekitar tiga bulan lalu. Relokasi dilakukan karena kawasan itu akan menjadi pinto masuk Jogja Planning Gallery (JPG).

Sebab Melibora nantinya akan betar besar diotopikan sebagai kawasan pedestrian. Sehingga arus lalu lintas akan dialihkan di strip-strip kawasan Melibora.

"Karenanya kami beri waktu bagi pedagang Jalan Perwalian sebelum leperumanti perpanjangan pindah. Mengang sampai akhir tahun karena DIED (detail engineering design) kami dimah 2023," katanya.

Perkot dalam hal ini tidak akan membetuk perpanjangan waktu relokasi. Apalagi para pedagang meminta relokasi dilakukan pada

2024 bersamaan dengan pembangunan JPG di kawasan Teras Maliboro 2 dan karter DPOEDJ yang akan dimulai pada tahun ini. "Ya memang sudah lama kok (pedagang harus pindah) kami sudah kita beri waktu dari dulu. Mereka ngoyong (menawar) di zona (Desak) sampai dibangunnya JPG itu," ujarnya.

Sumardi menambahkan, para pedagang Jalan Perwalian sebenarnya sudah mengakui mereka tidak berhak berjualan di Jalan Perwalian. Karenanya, pemkot meminta mereka segera pindah dari kawasan itu. Tak soal mengosong, pemkot mengklaim memberikan sejumlah pilihan relokasi bagi pedagang Jalan Perwalian. Di antaranya di Pasar Beringharjo lantai 2. Selain itu, Pemkot memberikan pilihan relokasi di Pasar Klinik, Kuncen.

"Tapi mereka minatnya di Teras Maliboro 1, padahal kami sudah pindah di sana. Sudah kita siapkan di Pasar Klinik karcen. Dipindah di sana. Relokasi ini kami sudah pindah di sana. Sudah kita siapkan sebagai alternatif karena kami pindah di Pasar Beringharjo ndasar dawong gliem. Ad angoyong ngoyong nilai (nilai menawar terus) tidak bisa, nanti ada rampang (selesai), terus kita karaggad angoyong," jelasnya.

Sekprov DI Bakara Aji menambalikin, pengpro mengoyarkan masalah relokasi kepada pemkot. Penidahan memang harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pembangunan JPG dilakukan. "Kebijakan pelaksanaan kami di kota. Silakan pedagang bicarakan dengan pemkot," katanya.

Aji menjelaskan JPG memang baru akan dibangun 2023 setelah Teras Maliboro 2 dipindah. Pengpro baru menyiapkan pembelian tanah untuk relokasi pedagang Teras Maliboro 2 ke tempat yang baru. "DPOEDJ juga belum disiapakan keplidannya, jadi kita siapkan semuanya sebelum perant 2024, termasuk yang kawasan Jalan Perwalian itu," tambahny (wta/ha/9)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005